ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

**Terindeks**: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i3.5592

# PERKEMBANGAN TERBARU DALAM PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK: NEW PUBLIC GOVERNANCE

## Recent Developments in the Public Administration Paradigm: New Public Governance

**Muhammad Ali & Lalu Muh. Kabul**
Universitas Muhammadiyah Mataram; Universitas Teknologi Mataram
khaidiraliihsan@gmail.com; lpp.lombok@gmail.com

**Article Info:**

| Submitted: | Revised: | Accepted: | Published: |
|---|---|---|---|
| Apr 1, 2025 | Apr 15, 2025 | Apr 27, 2025 | May 2, 2025 |

**Abstract**

The research is motivated by the difference paradigms in public administrative science such as public administration paradigm of Nicholas Henry, Mark, and Osborne. The difference occurred due to there is no classification yet. The research aims to analyze latest development in revolutionary paradigm of public administration. A qualitative approach is employed, utilizing literature review with an integrative technique. Data is collected from various sources such as articles, books, and other text, and analized by content analysis. The result indicate that public administrative science can be classified into two paradigms, namely evolutionary paradigm and revolutionary paradigm. A public administration paradigm of Nicholas Henry can be classified into evolutionary paradigm. Meanwhile, a public administration paradigm of Mark and Osborne can be classified into revolutionary paradigm. In the context of revolutionary paradigm, latest development paradigm of public administration is new public governance.


Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

**Keywords**: Paradigm, Public Administration, Evolutionary, Revolutionary, New Public Governance.

**Abstrak**: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan paradigma dalam ilmu administrasi publik seperti paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry, Mark, dan Osborne.Perbedaan ini terjadi karena belum adanya klasifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan terbaru dalam paradigma revolutif administrasi publik. Dalam penelitian digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan teknik integratif. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber seperti artikel, buku, dan teks lainnya kemudian dianalisis dengan menggunakan "content analysis". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu adminitrasi publik dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) paradigma, yaitu paradigma evolutif dan paradigma revolutif. Paradigma administrasi publik yang dikemukakan oleh Nicolas Henry dapt diklasifikan kedalam paradigma evolutif. Sementara, paradigma administrasi publik menurut Mark dan Osborne dapat diklasifikan kedalam paradigma revolutif. Dalam konteks paradigma revolutif, perkembangan terbaru dalam paradigma administrasi publik adalah new public governance.

**Kata Kunci:** Paradigma, Administrasi Publik, Evolutif, Revolutif, New Public Governance

## PENDAHULUAN

Sistem administrasi telah dikenal sejak 1491 SM. Ketika Nabi Musa bermigrasi dari Mesir ia mengikuti saran ayah mertuanya Jethro untuk melakukan delegasi kekuasaan berdasarkan garis hierarki kekuasaan (Basheka, 2012). Dalam konteks delegasi Nabi Musa tersebut tersebut disebutkan dalam kitab Suci Al-Qur'an (Taha:29-30) agar dijadikan untuknya seorang penolong dari keluarganya yaitu Harun saudaranya. Stuktur pemerintahan di Mesir terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja yang disebut *Pharaoh* dan dibantu oleh Perdana Menteri. Di Mesir dikenal *Ptolemies* sebagai sebuah sistem administrasi untuk memerangi pihak-pihak yang melemahkan pemerintah pusat termasuk pihak-pihak yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pemerintahan kerajaan Mesir mulai melemah setelah 1100 SM karena tidak efektifnya sistem administrasi (Ajdini, 2014).

Di China pada masa kekuasaan Dinasti Han (206 SM-220 SM) mengadopsi konsep Konfusionisme dimana aparat pemerintahan harus dipegang oleh orang-orang dipilih berdasarkan bakat dan kemampuannya bukan berdasarkan keturunan (Hughes, 2019). Pada tahun 124 SM telah ada universitas di China yang mengajarkan adminsitrasi publik dengan jumlah mahasiswa sebanyak 50 orang dengan usia 18 tahun keatas dimana mahasiswa

tersebut diseleksi dari setiap provinsi (Basheka, 2012). Di Kekaisaran Roma dibawah Kaisar Marcus Tullius Cicero (106SM-43SM) sistem administrasi berkembang pesat dimana sistem administrasi dipegang oleh pelayan publik yang disebut *praefetus urbi* (Ajdini, 2014). Pada awalnya sistem administrasi bersifat personal dimana loyalitas pada individu tertentu seperti Raja atau Perdana Menteri bukan impersonal berdasarkan legalitas dan loyalitas terhadap organisasi dan negara (Hughes, 2019). Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Lebih jauh Hughes (2019) menyatakan bahwa di Amerika Serikat pada abad ke-19 terdapat sistem administrasi *spoils* dimana setelah pemilihan umum (pemilu) selesai semua jabatan administrasi dari posisi yang paling tinggi hingga terendah diisi dan diangkat oleh partai pemenang pemilu. Hal ini mencapai puncaknya pada tahun 1830 pada masa pemerintahan Presiden Andrew Jackson. Sistem administrasi *spoils* itulah yang menjadi penyebab terjadinya korupsi endemik dalam pemerintahan. Sistem administrasi *spoils* tersebut kemudian direformasi di Amerika Serikat yang dipelopori oleh Woodrow Wilson dan di Eropah oleh Wax Weber. Berdasarkan birokrasi Weber dikenal pelayan publik profesional, rekruitmen dan penunjukannya berdasarkan meritokrasi, netralitas politik. Disisi lain, pemikiran Wilson melahirkan pandangan bahwa politik bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan, sedangkan administrasi pada pelaksanaannya.

Paradigma ilmu pengetahuan atau sains meliputi paradigma evolutif dan paradigma revolutif (Samudra dan Suradika, 2022; Coccia, 2019). Paradigma evolutif dalam bidang biologi dipelopori oleh Darwain (1859) dalam karyanya *On the Origin of Species* kemudian dalam ilmu sosial oleh Herbert Spencer (1902) dan dalam bidang ilmu administrasi publik oleh Nicholas Henry (1995). Dalam pada itu, Nicholas Henry (1995) dalam Basheka (2012) dan Keban (2019) menyatakan bahwa paradigma adminsitrasi publik meliputi paradigma 1:dikotomi politik dan administrasi (1887-1926), paradigma 2:prinsip-prinsip administrasi (1927-1937), paradigma 3:ilmu administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970), paradigma 4:ilmu administrasi publik sebagai manajemen (1950-1970), paradigma 5: ilmu administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik (1970-sekarang).

Sejauh ini paradigma revolutif yang banyak dikenal dalam administrasi publik meliputi paradigma *old public administration*, *new public management*, dan *new public services* (Mark, 2015 ; Keban, 2019). Penelitian ini berbeda dengan paradigm revolutif sebelumnya dimana fokus penelitian ini pada perkembangan terbaru dalam paradigma administrasi publik yaitu *new public governance* (Osborne, 2010 ; Krog & Triantafillou, 2024). Berkaitan dengan hal tersebut,

maka tujuan penelitian yaitu menganalisis perkembangan paradigma revolutif administrasi publik mulai dari tahap *old public administration* hingga *new public governance*.

## METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode studi pustaka (*library research*). Dalam metode studi pustaka dikenal tiga jenis pendekatan, yaitu sistematik, semi-sistematik, dan integratif (Snyder, 2019). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan integratif dengan pertimbangan dimana penelitian ini dimaksudkan sebagai sebuah kritik dan sintesa dengan tahapan meliputi pengumpulan data untuk memahami dan mempelajari teori-teori yang bersumber dari artikel, buku, dan teks publikasi lainya, kemudian data dianalisis secara kualitatif dan kontribusi penelitian pada model teoritis.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan *content analysis* untuk memperoleh pengambilan kesimpulan yang valid dan dapat direplikasi dari teks menuju konteks (Macnamara, 2018 ; Elo, 2020).

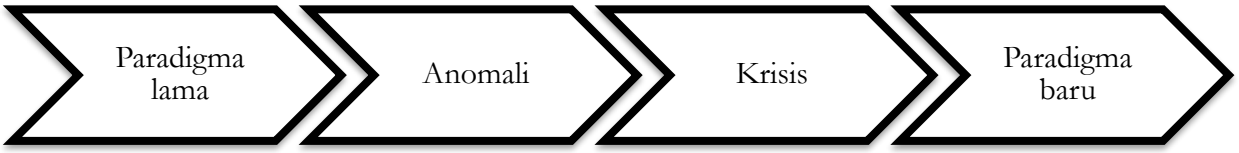
## HASIL

### Paradigma Revolutif Kuhn

Thomas S. Kuhn dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolutions* yang diterbitkan pada tahun 1962 menolak pemikiran Auguste Comte tentang positivisme dan falsifikasi Karl Popper. Menurut Kuhn bahwa perkembangan ilmu pengetahuan (sains) tidaklah terjadi secara kumulatif melalui verifikasi dan falsifikasi teori, melainkan melalui perubahan sangat mendasar yang disebut revolusi ilmiah. Lebih jauh Kuhn menyatakan bahwa kebenaran sains bersufat relatif, sehingga kapanpun dapat direvolusi, yaitu ketika paradigma lama digantikan oleh paradigma baru. Paradigma berasal dari bahasa Yunani yaitu *para* berarti disamping dan *deiknumi* berarti model atau contoh. Oleh Kuhn paradigma didefinisikan sebagai praktek ilmiah aktual contohnya hukum, teori, aplikasi, dan instrumen yang diterima bersama sebagai sumber tradisi khusus dalam penelitian ilmiah (Kusuma & Hidayat, 2020).

Paradigma sains ibarat lensa melaluinya ilmuwan dapat mengamati dan memahami masalah-masalah ilmiah dan jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah tersebut pada bidangnya masing-masing. Paradigma merupakan pola, bentuk atau model untuk menjelaskan suatu proses ide. Disisi lain, paradigma juga merupakan asumsi-asumsi teoritis dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi yang dianut secara bersama oleh komunitas

ilmuwan. Revolusi ilmiah terjadi melalui perubahan paradigma yakni ketika digantikannya paradigma lama oleh paradigma baru (Anand et al, 2020). Kuhn menjelaskan bahwa apabila paradigm lama atau teori yang dihasilkan masih mendukung paradigm lama, maka sain berada pada kondisi normal (*normal science*). Tetapi apabila di suatu masa ditemukan penyimpangan terhadap *normal science* yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigm lama, maka kondisi ini disebut *anomali.* Akhirnya paradigma lama mengalami *krisis* dan kemudian terjadi revolusi ilmiah dengan ditemukan atau dibangunnya paradigm baru. Setelah revolusi illmiah dengan ditemukannya paradigma baru yang didukung oleh teori-teori baru, maka sains kembali ke kondisi normal atau *normal science* (Takdir & Arif, 2022 ; Giere, 2022). Dalam pada itu, kerangka pemikiran Kuhn dalam proses revolusi ilmiah ditampilkan pada gambar 1.




Gambar 1. Kerangka Pemikiran Revolusi Ilmiah Kuhn

Sumber:Diolah dari Anand et al (2020)

Berikut dikemukakan penerapan revolusi ilmiah Kuhn dalam Fisika. Dalam hukum gravitasi Newton disebutkan bahwa gravitasi disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik dari sebuah benda dengan benda lainnya yang besarnya berbanding lurus dengan masa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Dalam tata surya, gravitasi inilah yang mempengaruhi bentuk garis edar planet mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars hingga Pluto terhadap matahari. Menurut hukum gravitasi Newton jika yang ditinjau hanya pengaruh gravitasi matahari terhadap planet Merkurius, maka garis edarnya berupa elips sempurna dengan matahari berada pada salah satu titik apinya. Tetapi jika pengaruh gravitasi planet lainnya juga diperhitungkan, maka garis edar planet Merkurius tidak lagi berupa elips sempurna, tetapi elips yang bergerak atau elips yang berpresesi (bergeser). Ini berarti bahwa setelah melakukan satu putaran penuh mengelilingi matahari, planet Merkurius tidak kembali ke kedudukannya yang semula, tetapi begerak menjauhinya. Berdasarkan hukum gravitasi Newton seharusnya diperoleh sudut geser planet Merkurius setiap seratus tahun atau satu abad sebesar 5557,62 detik busur. Namun terjadi penyimpangan yang justru muncul sebagai "anomali" bagi ilmuwan dimana berdasarkan hasil pengamatan sudut geser planet Merkurius setiap satu abad besarnya 5600,73 setik busur atau terjadi penyimpangan sebesar 43,11 detik busur.

Adanya *anomali* ini kemudian melahirkan *krisis* dimana hukum gravitasi Newton sebagai pradigma lama tidak mampu menjelaskan penyimpangan tersebut, kemudian ditemukan paradigma baru yang dibangun oleh teori Einstein yang menyatakan bahwa gravitasi disebabkan oleh kelengkungan ruang-waktu. Terjadi revolusi ilmiah dimana hukum gravitasi Newton yang merupakan paradigma lama digantikan oleh teori Einstein sebagai paradigma baru. Selain Fisika berikut dikemukakan penerapan revolusi ilmiah Kuhn dalam ilmu ekonomi. Ahli ekonomi A.W.Phillips pada tahun 1958 berdasarkan perekonomian Inggris 1861-1957 menyatakan adanya hubungan negarif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran yang selanjutnya disebut sebagai Kurva Phillips. Artinya jika tingkat inflasi naik, maka tingkat pengangguran turun, demikian sebaliknya jika tingkat inflasi turun, maka tingkat pengangguran naik.

. Seiring dengan terjadinya stagflasi di negara-negara industri pada tahun 1970-an terjadi penyimpangan yang menimbulkan *anomali* dimana berdasarkan data tingkat inflasi rata-rata dan tingkat pengangguran rata-rata pada 7 (tujuh) negara industri yaitu Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Tingkat inflasi rata-rata di 7 (tujuh) negara industri tersebut mengalami peningkatan dari 3,7 persen pada tahun 1961-1965 menjadi 4,1 persen pada tahun 1966-1970 dan 9,3 persen pada tahun 1971-1975. Kenaikan tingkat inflasi tersebut diikuti dengan naiknya tingkat pengangguran dari 2,0 persen pada tahun 1961-1965 menjadi 2,2 persen pada tahun 1966-1970 dan 2,9 persen pada tahun 1971-1975. Hubungan positif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tersebut dikemukakan oleh Milton Friedman dan Edmund Phelps pada tahun 1968 yang kemudian dikenal sebagai Kurva Friedman-Phelps.

Dalam pada itu, *anomali* tersebut kemudian melahirkan *krisis* dimana Kurva Phillpis sebagai pradigma lama tidak mampu menjelaskan penyimpangan tersebut, kemudian ditemukan paradigma baru yang dibangun oleh Friedman dan Phelps yang disebut Kurva Friedman-Phelps. Akhirnya terjadi revolusi ilmiah dimana Kurva Phillips yang merupakan paradigma lama digantikan oleh Kurva Friedman-Phelps sebagai paradigma baru

**Paradigma Revolutif Adminitrasi Publik**

Perubahan paradigma sain secara revolutif tidak hanya terjadi pada Fisika dan Ekonomi, tetapi juga pada disiplin ilmu lainnya termasuk adminsitrasi publik. Paradigma revolutif administrasi publik dimulai dari *old public administration* kemudian bergeser ke *new public*

*management*, *new public services* dan kini yang terbaru adalah *new public governance* sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 (Mark, 2015; Keban, 2019 ; Osborne, 2010; Osborne, 2016).

Tabel 1. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

| | Old Public Administration | New Public Management | New Public Services | New Public Governance |
|---|---|---|---|---|
| Dasar teori | Teori Politik | Teori Ekonomi & Manajemen | Teori Demokrasi | Teori Kelembagaan & Jejaring |
| Fokus | Sistem Politik | Organisasi | Organisasi | Organisasi dan Lingkungannya |
| Mekanisme alokasi sumber daya | Hierarki | Pasar | Hierarki | Jejaring |
| Peran Pemerintah | Rowing | Steering | Serving | Collaborating |
| Konsepsi kepentingan public | Politis | Agregasi kepentingan individu | Dialog berbagai nilai | Kolaborasi berbagai sumberdaya |
| Sasaran pelayanan | Klien & konstituen | Pelanggan | Warganegara | Warganegara |
| Mekanisme untuk mencapai sasaran kebijakan | Adminsitrasi program melalui lembaga pemerintah | Peciptaan mekanisme melalui lembaga swasta dan lembaga nirlaba | Membangun koalisi publik dengan lembaga nirlaba | Membangun kolaborasi publik dengan lembaga nirlaba & masyarakat |

Sumber : Diolah dari Keban (2019), Mark (2015) dan Osborne (2016)

## PEMBAHASAN

### Old Public Administration

Gagasan Max Weber mengenai administrasi publik pada tahun 1921 dan Woodrow Wilson pada tahun 1887 merupakan model birokrasi berdasarkan pendekatan hierarki dan meritokrasi. Pendekatan tersebut digunakan sebagai reformasi birokrasi di Inggris dan Prusia pada akhir abad ke-19 untuk mengatasi sistem patrimonial dimana patronase mendominasi keputusan pemerintah. Dalam pendekatan ini pengawasan bersifat terpusat, adanya seperangkat aturan dan pedoman, terpisahnya pembuatan kebijakan dari implementasi, dan adanya struktur birokrasi yang bersifat hierarkis. Pendekatan komando dan pengawasan

dalam adminsitrasi publik menjadi rujukan sistem birokrasi yang diperkenalkan di dunia dibawah aturan kolonial dan setelah kemerdekaan pada hampir semua negara. Pendekatan *old public administration* dipelopori oleh Max Weber, Woodrow Wilso, Frederick Taylor, Luther Gulick, Herbert Simon, dan lain-lain (Mark, 2015 : Hughes, 2019).

Perancis dan Jepang misalnya menerapkan model birokrasi terpusat dalam pemerintahannya, demikian pula China dalam konteks satu partai. Pasca kolonial berbagai negara mengalami penurunan kualitas pemerintahan dan efektivitas administrasi publik dalam beberapa tahun karena adanya tekanan *neo-patrimonial* dan sumber daya publik hanya dinikmati oleh pimpinan politik dan pengikutnya. Pada akhir tahun 1940-an hingg tahun 1970-an birokrasi pemerintah selain hierarkis, juga tidak efisien, dan yang dilayani justru birokrasi, bukan warga masyarakat (Byrkjeflot et al, 2017).

**New Public Management**

*New Public Management* (NPM) merupakan pendekatan baru dalam adminsitrasi publik dan manajemen yang muncul di sejumlah negara OECD pada tahun 1980-an. Model NPM merupakan reaksi atas keterbatasan *old public administration* dalam menghadapi kompetitifnya ekonomi pasar. Disisi lain, kandungan biaya merupakan faktor kunci yang diadopsi dalam pendekatan NPM, menyuntikkan prinsip-prinsip kompetisi dan manajemen sektor swasta sebagai inti pendekatan NPM. Elemen kunci NPM meliputi pembelajaran dari manajemen sektor swasta, fokus pada kepemimpinan kewirausahaan dalam organisasi pelayanan publik, penekanan pada input dan pengawasan output, evaluasi manajemen kinerja dan audit, fokus pada manajemen biaya, pertumbuhan berbasis pasar, kompetisi dan kontrak untuk alokasi sumberdaya dan penyediaan layanan dalam pelayanan publik (Mark, 2015).

Pendekatan NPM berawal di Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Skandinavia.Pada pertengahan tahun 1980-an pendekatan NPM menghasilkan perubahan signifikan pada etos dan pendekatan sektor publik, khususnya pembudayaan praktek manajemen baru, pemasaran dan mengontrakkan pelayanan kepada perusahaan swasta dan organisasi nir-laba. Manajamen hasil mengganti orientasi sektor publik yang diatur oleh input dan output, serta makin meresapnya manajemen kerja kedalam sektor publik (Haligan, 2022). Menurut Huhges (2019) bahwa istilah lain yang lazim digunakan untuk pendekatan NPM antara yaitu *managerialism* (Pollit, 1990), *new public management* (Hood, 1997), *market-based public administration*, *entrepreneurial government* (Osborne & Gaebler, 1992).

**New Public Services**

Pendekatan *New Public Services* (NPS) fokus pasa warga masyarakat da masyarakat. Dalam pendekatan NPS peran utama dari pelayan publik adalah membantu warga masyarakat untuk mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama, bukan mengawasi ataupun mengarahkan seperti pada pendekatan NPM. Selain itu, pendekatan NPS berbeda dengan NPM yang menekankan pada transaksi antara manajemen publik dengan pelanggan yang merefleksikan kepentingan individu berdasarkan prinsip pasar. NPS juga berbeda dengan *old public administration* dimana warga masyarakat dalam kaitannya dengan birokrasi sebagai klien atau konstituen yang diperlukan sebagai penerima pasif berdasarkan pembuatan kebijakan *top-down* dalam mekanisme pemberian pelayanan. Menurut Mark (2015) bahwa pendekatan NPS ini antara lain dipelopori oleh Robert B.Denhardt (1981), King & Stivers (1998), Robert Putnam (2000), Janet V.Denhardt & Rober B.Dehardt (2007).

Dalam NPS, birokrasi bukan mengawasi atau mengarahkan warga masyarakat dalam pemecahan masalah kebijakan, tetap lebih fokus pada menjembatani, negoisasi dan pemecahan permasalahan kompleks melalui kemitraan dengan warga masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah dituntut untuk terbuka dan menyediakan akses, akuntabel, responsif, dan bekerja melayani warga masyarakat. Dalam pada itu, NPS meliputi 4 (empat) elemen, yaitu: (1) membangun hubungan kolaboratif dengan warga masyarakat dan kelompok masyarakat, (2) mendorong tanggung jawab bersama, (3) desiminasi informasi untuk meningkatkan diskursus publik dan isu publik, (4) melibatkan peran warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah (Mark, 2015).

**New Public Governance**

Pendekatan *New Public Governance* (NPG) berbeda dengan *old public administration* yang lebih menekankan pada hierarki birokrasi dan juga berbeda dengan NPM yang menekankan pada diskresi manajerial dan mekanisme kontrak. Pendekatan NPG menempatkan warga masyarakat sebagai kerangka rujukan, bukan pemerintah. Dalam pada itu, pendekatan NPG lahir sebagia sebuah produk dan respon terhadap begitu komplek, beragam, dan terpencarnya implementasi kebijakan publik dan penyediaan layanan pada abad ke-21. Peran sentral warga masyarakat sebagai bagian dari pembuatan kebijakan dan penyedia layanan merupakan hal mendasar yang membedakan NPG dengan *old public administration* dan NPM. Dalam NPG, pembuatan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor tunggal, melainkan beragam aktor. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai aktor tunggal dalam

pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (Mark, 2015 ; Kennet, 2010). Menurut Mark (2015) dan Osborne (2010) bahwa pendekatan NPG ini antara lain dipelopori oleh Osborne (2010), Osborne (2016), Peters (2010), O.Toole (2010), Martin (2010)

Pendekatan NPG menekankan pada proses relasi antar-organisasi yang dilandasi pada relasi saling percaya (*trust*) pada relasi modal, dan relasi kontrak melayani sebagai mekanisme utama, bukan pada bentuk dan fungsi organisasi. Dalam pendekatan administrasi konvensional, proses relasi antar-organisasi tersebut merupakan domain pemerintah yang membedakannya dengan organisasi swasta dan organisasi nir-laba. Disisi lain, mekanisme alokasi sumber daya dilakukan melalui jaringan antar-organisasi dan akuntabilitasnya dinegoisasikan dalam jaringan antar-organisasi (Osborne, 2016 ; Patapas et al, 2014).

## KESIMPULAN

Dalam ilmu administrasi publik ditemukan adanya perbedaan dalam paradigma administrasi publik seperti yang dikemukakan oleh Nicholas Henry, Mark, dan Osborne. Disatu sisi, paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry meliputi 5 (lima) paradigma, yaitu paradigma 1:dikotomi politik dan administrasi (1887-1926), paradigma 2:prinsip-prinsip administrasi (1927-1937), paradigm 3:ilmu administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970), paradigma 4:ilmu administrasi publik sebagai manajemen (1950-1970), paradigma 5: ilmu administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik (1970-sekarang). Disisi lain, paradigm administrasi publik menurut Mark dan Osborne meliputi *old public administration, new public management*, *new public services.*

Perbedaan paradigma dalam ilmu administrasi publik terjadi karena belum adanya klasifikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu adminitrasi publik dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) paradigma, yaitu paradigma evolutif dan paradigma revolutif. Paradigma administrasi publik yang dikemukakan oleh Nicolas Henry termasuk dalam paradigma evolutif. Sedangkan paradigma administrasi publik menurut Mark dan Osborne termasuk dalam paradigma revolutif. Dalam konteks paradigma revolutif, perkembangan terbaru dalam paradigma administrasi publik adalah *new public governance.*

## DAFTAR PUSTAKA

Ajdini, S. (2014). Public Administration in Ancient Rome and Egypt. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3(6), 385-390. https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n6p385

Anand, G. et al. (2020). Thomas Kuhn on Paradigm. Production and Operation Management, 29(7), 1650-1657. https://doi.org/10.1111/poms.13188

Basheka, B. C. (2012). The Paradigm of Public Administration Re-examined: A Reflection. Journal of Public Administration, 47(1), 25-67.

Byrkjeflot, H. et al. (2017). What is the Neo Weberian State as a Regime of Public Administration? The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, 991-1009.

Coccia, M. (2019). Revolutions and Evolutions dalam A. Farazmand (ed.). Global Encyclopedia ofPublic Administration, Public Policy, and Governance. Springer Nature, Switzerland, 1-6. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816_3708-1

Elo, S. et al. (2014). Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness. Sage Open, January-March, 1-10. https://doi.org/10.1177/2158244014522633

Giere, R. N. (2022). Philosophy of Science Naturalized. Philosophy of Science, 52(3), 331-356. https://doi.org/10.1086/289255

Halligan, J. (2022). Public Management Reform in K. Scheller (ed.). Elgar Encyclopedia of Public Management. Edward Elgar, Cheltenham. https://doi.org/104337/9781800375499.public-management.reform

Hughes, O. E. (2019). Public Management and Administration: An Introduction. Palgrave MacMillan.

Keban, Y. T. (2019). Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Penerbit Gava Media.

Kementerian Agama. (n.d). Al Qur'an dan Terjemahannya. Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI.

Krog, A. H. & Triantafillou, P. (2024). Developing New Public Governance as a Public Management Reform Model. Public Management Review, 26(10), 3040-3056. https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2313539

Kusuma, U. & Hidayat, A. W. (2020). Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma. Islamadina Journal Pemikiran Islam, 21(2), 167-187. https://doi.org/10.30595/islamadina.v21i2.6043

Macnamara, J. (2018). Content Analysis dalam P. Napoli (ed.). Mediated Communication. de Gruyter Mouton, Berlin, Germany and Boston, MA, 191-212. https://doi.org/10.101515/9783110481129-012

Mark, R. (2015). From Old Public Administration to the Public Sector Reform in Developing Countries. UNDP Global Centre for Public Services Excellence, Singapore.

Osborne, S. P. (2010). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, 1st edition. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203861684

Osborne, S. P. (2016). The New Public Governance? Public Management Review, 8(3), 377-387. https://doi.org/10.1080/14719030600853022

Patapas, A. et al. (2014). New Public Governance: The Tracks of Change. International Journal of Business and Social Research, 4(5), 25-32. https://doi.org/10.18533/ijbsr.v4i5.478

Samudra, A. A. dan Suradika, A. (2022). Filsafat Ilmu dan Metode Berpikir Transrasional. Penerbit Samudra Biru.

Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guideline. Journal of Business Research, 104, 333-339. https://doi.org/10.1016/j.jnusres.2019.07.039

Takdir, M. & Arifin, M. (2022). The Scientific Revolution of Thomas S. Kuhn and Its Contribution to the Conflict Resolution Paradigm in Indonesia. Journal Sosiologi Dialektika, 17(2), 147-158. https://dx.doi.org/10.201473/jsd.v17i2.2022.147-158